

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN NANGGUNG
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Nanggung merupakan bentuk implementasi pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. sekaligus mempedomani RK Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tahun 2020 yang diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RK Kecamatan Nanggung) Tahun 2023, dengan memedomani tahun perencanaan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Dalam hal penyusunan Renja Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Bogor sedang melakukan proses penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 yang secara otomatis diikuti oleh perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan akibat terjadinya

perubahan-perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, bencana pandemi covid-19, serta perubahan-perubahan kebijakan nasional yang mulai diberlakukan pada tahun 2021.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKKecamatan Nanggung), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bogor.

Berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu :

1. Persiapan penyusunan Renja;
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja;
3. Penyusunan Rancangan Renja;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah;
5. Penyusunan Rancangan Akhir Renja; dan
6. Penetapan Renja

Penyusunan Renja Tahun 2023 terletak pada substansi program, kegiatan dan sub kegiatan yang kini mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Hal ini telah dilaksanakan pada penyusunan

Renja Tahun 2023, namun masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dengan demikian, penyusunan Renja Tahun 2023 disusun bersamaan dengan perubahan RPJMD, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta RKKecamatan NANGGUNG Tahun 2023.

Proses penyusunan Renja Kecamatan Nanggung tahun 2023 dilakukan secara bersamaan dengan penginputan data usulan pada SIKecamatan Nanggung. Dengan demikian, diharapkan substansi dokumen Renja Kecamatan Nanggung Tahun 2023 khususnya usulan program, kegiatan dan sub kegiatan, sama dengan data yang diinput dalam SIPD Kecamatan Nanggung.

Dalam pelaksanaan tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu :

Tahap I mengakomodir yang telah direncanakan dalam Renstra untuk tahun 2023 (Rancangan Awal Renja)

Program	Kegiatan	Anggaran	Pengampu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kegiatan 7 Sub Kegiatan	120,000,000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	110,000,000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	35,000,000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1 Kegiatan 5 Sub Kegiatan	205,000,000	Kecamatan Nanggung

UMUM			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1 Kegiatan 12 Sub Kegiatan	230,000,000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8 Kegiatan 23 Sub Kegiatan	5,124,684,942	Kecamatan Nanggung

Pemeringkatan Prioritas Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 berdasarkan Rancangan Awal Renja dengan hasil usulan musrenbang RKKecamatan Nanggung di kecamatan dalam Forum Perangkat Daerah (Rancangan Renja).

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran	Pengampu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	127,521,799	Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	22,850,252	Kecamatan
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	17,494,000	Kecamatan

	Kecamatan			
		Fasilitasi Percepatan pencapaian standard pelayanan minimal di wilayah kecamatan	17,509,910	Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	17,494,000	Kecamatan
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non perizinan	38,000,000	Kecamatan
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	17,494,000	Kecamatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	40,000,000	Kecamatan
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	21,000,000	Kecamatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	15,750,000	Kecamatan

		Kecamatan		
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10,500,000	Kecamatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17,494,000	Kecamatan
		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	17,494,000	
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	17,494,000	
		Pembinaan Kerukunan	125,000,000	

		Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	17,494,000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	68,000,000	Kecamatan
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	25,000,000	Kecamatan
		Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	32,000,000	Kecamatan
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.000.000	Kecamatan
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	20,000,000	Kecamatan
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	60,000,000	Kecamatan

		Daerah Dengan Pembangunan Desa		
		Fasilitas Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	45,000,000	Kecamatan
		Fasilitas Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	38,000,000	Kecamatan
		Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	38,000,000	Kecamatan
		Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	65,000,000	Kecamatan
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25,000,000	Kecamatan
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	25,000,000	Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	Kecamatan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKKecamatan NANGGUNG	25,000,000	Kecamatan
		Koordinasi dan	25,000,000	Kecamatan

		Penyusunan DPA- Kecamatan NANGGUNG		
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah	25,000,000	Kecamatan
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- Kecamatan NANGGUNG	25,000,000	Kecamatan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan NANGGUNG	55,000,000	Kecamatan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	Kecamatan
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,960,350,0 00	Kecamatan
		Koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	55,000,000	Kecamatan
		Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	25,000,000	Kecamatan
		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semester an	20,000,000	Kecamatan
		Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	25,000,000	Kecamatan
	Administrasi Barang	Penyusunan	25.000.000	Kecamatan

	Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendataan pengelolaan administrasi kepegawaian	68.000.000	Kecamatan
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan logistik kantor	25,000,000	Kecamatan
		Fasilitas kunjungan tamu	30.000.000	Kecamatan
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi Kecamatan NANGGUNG	30.000.000	Kecamatan
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	350.000.000	Kecamatan
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	900,000,000	Kecamatan
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	280.000.000	Kecamatan
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa surat menyurat	25,000,000	Kecamatan
		Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air, dan listrik	69.800.000	Kecamatan
		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	177,600,000	Kecamatan
	Pemeliharaan	Penyediaan Jasa	55.000.000	Kecamatan

	Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		
--	--	---	--	--

Memedomani Final RK Kecamatan NANGGUNG (Final Renja)

Program	Kegiatan	Anggaran	Pengampu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kegiatan 7 Sub Kegiatan	313.062.340	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	121.129.300	Kecamatan Nanggung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	87.500.000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1 Kegiatan 5 Sub Kegiatan	220.120.000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1 Kegiatan 12 Sub Kegiatan	332.334.561	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8 Kegiatan 23 Sub Kegiatan	4.929.859.53 9	Kecamatan Nanggung

Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Nanggung Tahun 2023, memperhatikan keterkaitan antara 2 Pedoman Penyusunan, yaitu:

1. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2023

Dalam penyusunan RKKecamatan Nanggung Kecamatan Nanggung Tahun 2023 menggunakan 2 versi keterkaitan yaitu Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Renstra Kecamatan Nanggung Tahun 2018 – 2023 dan Hasil Pemetaan PMDN No.90 Tahun 2019 sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Keterkaitan Renja terhadap RK Kecamatan Nanggung Tahun 2023

PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM	OUTCOME		TARGET	
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN
1	2	3	4	5	
Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik dalam rangka pemulihan ekonomi daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	%
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan	60	%
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah	90	%
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penanganan gangguan trantibum	100	%
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	100	%
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	95	%

2. Pencapaian Target Sasaran Daerah (IKU) untuk tahun 2023

Pada Program dan Kegiatan Kecamatan Nanggung Pada Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 :

1. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan jumlah 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan jumlah 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan jumlah 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dengan jumlah 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan jumlah 1 Kegiatan 12 Sub Kegiatan;
6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan jumlah 8 Kegiatan 23 Sub kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Renja Kecamatan Nanggung tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Nasional berdasarkan hasil pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tertera pada table berikut :

Adapun keterkaitan antara Renja Kecamatan Nanggung tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Jawa Barat berdasarkan hasil pemetaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 90 Tahun 2019 tertera pada table berikut :

PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT	PROGRAM	OUTCOME		TARGET		
		TOLOK UKUR KINERJA	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	SATUAN	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5		
Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	100	%	4.929.859.539
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		Persentase Pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan	60	%	313.062.340
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan		Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah	90	%	121.129.300
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Persentase penanganan gangguan trantibum	100	%	87.500.000
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	100	%	220.120.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi	95	%	332.334.561

Terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Jawa Barat menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Kabupaten Bogor. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020-2021. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2020-2021 untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan penyediaan jaring pengaman sosial (social safety net). sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan COVID-19.

Memperhatikan perkembangan kondisi akibat pandemi COVID-19 yang berdampak buruk terhadap aspek kesehatan, sosial, ekonomi dan telah merambat ke aspek kehidupan lainnya, maka perlu dilakukan penyesuaian target indikator kinerja makro, tujuan dan sasaran (IKU), serta indikator IKK tingkat dampak (impact) dan tingkat hasil (outcome). Selain

itu, perlu ditetapkan/diambil juga kebijakan-kebijakan pembangunan jangka menengah terkait penanganan pandemi COVID-19 dan upaya untuk pemulihannya, sebagai kelanjutan dari upaya yang telah dilakukan sejak triwulan pertama Tahun 2020.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
4. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
5. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
6. Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 tahun 2020 Pasal 8 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi.

1.3 Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Nanggung Tahun 2023 ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai arah dan pedoman kerja bagi aparat Kecamatan Nanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019;
2. Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
3. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan tahunan lingkup Kecamatan Nanggung dengan perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Bogor;
4. Tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kinerja perangkat kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan 1 (satu) tahun mendatang;
5. Sebagai bahan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan;
6. Mengintegrasikan perencanaan pembangunan tahunan lingkup Kecamatan Nanggung dengan perencanaan pembangunan tahunan Kabupaten Bogor;

7. Tujuan disusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan meningkatkan kinerja perangkat kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan1 (satu) tahun mendatang.

1.4 Sistematika

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Nanggung tahun 2023, proses penyusunan Renja Kecamatan Nanggung, keterkaitan antara Renja RK Kecamatan Nanggung dengan dokumen RK Kecamatan Nanggung, Renstra Kecamatan Nanggung dengan Renja K/L dan Renja Kecamatan Nanggung Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Tahun 2023.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SK Kecamatan Nanggung, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Nanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKKecamatan Nanggung. Maksud penyusunan Renja merupakan tujuan yang bersifat global, sedangkan tujuan merupakan rincian pencapaian maksud, yang biasanya diuraikan dalam bentuk poin per poin.

Bab II :Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Nanggung Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Nanggung

Bab ini secara umum memuat kondisi kinerja Kecamatan Nanggung tahun 2019 (sebagai tahun dasar periode perencanaan jangka menengah yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Nanggung), dan realisasi pelaksanaan Renja tahun 2019 (sebagai tahun kedua perencanaan jangka menengah tahun 2018-2023), serta perkiraan target pencapaian tahun berjalan (tahun 2019) yang mengacu pada APBD tahun 2019. Disamping itu, Bab ini juga mengemukakan tentang pencapaian target Renstra SKKecamatan Nanggung tahun 2019 (akhir periode perencanaan jangka menengah) berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKKecamatan Nanggung tahun-tahun sebelumnya. Rincian substansi yang disajikan dalam bab ini

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nanggung

Sub Bab ini memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Nanggung berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan dalam Perubahan RPJMD dan/atau Renstra Kecamatan Nanggung Tahun 2018-2023 dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hasil analisis dimasukkan ke dalam tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Nanggung yang disesuaikan .

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nanggung

Sub bab ini memuat materi :

1. sejauhmana kinerja pelayanan Kecamatan Nanggung dan hal kritis yang terkait pelayanan Kecamatan Nanggung dengan mempertimbangkan antara target dan realisasi pencapaian indikator kinerja;

2. tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan. Gunakan minimal analisis SWOT sederhana, dengan kriteria : kekuatan dan kelemahan dipandang sebagai faktor internal Kecamatan Nanggung, sedangkan peluang dan tantangan dipandang sebagai faktor eksternal Kecamatan Nanggung;

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RK Kecamatan Nanggung Tahun 2023

Rancangan awal RK Kecamatan Nanggung mengacu pada substansi RPJMD Kabupaten Bogor sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Dalam Rancangan Awal RK Kecamatan Nanggung, seluruh program diadopsi dari Perubahan RPJMD, sedangkan seluruh kegiatan diadopsi dari Renstra Kecamatan Nanggung

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Proses perencanaan tahunan Kecamatan Nanggung tidak terlepas dari upaya mengakomodir usulan kebutuhan prioritas masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nanggung. Berdasarkan ketentuan, proses perencanaan tahun 2021 diarahkan untuk menjangkau aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur perencanaan.

Bab III :Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM

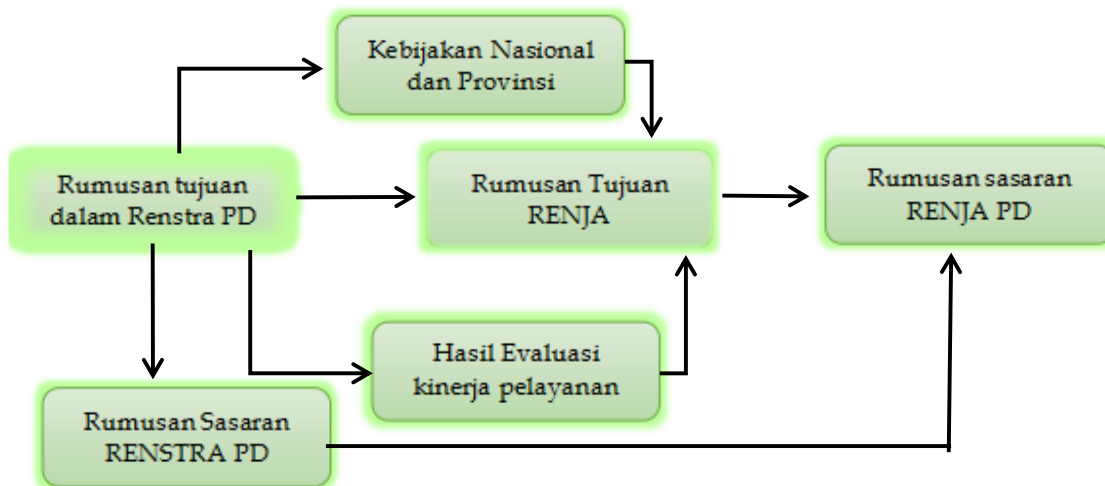
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Kinerja Kecamatan Nanggung di Kabupaten Bogor tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat tahun 2023. Untuk itu perlu dilakukan sinergi antara tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nanggung dengan kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Untuk mendukung data tersebut, dalam penyusunan Renja, Kecamatan Nanggung wajib melakukan koordinasi dengan Kecamatan Nanggung lingkup Provinsi Jawa Barat dan Kementerian yang terkait, serta mengakomodir dalam Renja Kecamatan Nanggung segala bentuk kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat yang tercantum dalam dokumen

RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat, RKP dan RKKecamatan Nanggung Provinsi Jawa Barat, serta aturan perundang-undangan terkait yang berlaku untuk bahan perencanaan tahun 2023. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi dituangkan dalam program dan kegiatan sebagaimana Tabel 3.1.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nanggung

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Nanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Rancangan Renstra SKKecamatan Nanggung. Deskripsi untuk mengisi sub bab ini, mengacu pada alur pikir sebagai berikut:



Gambar 3.1

Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Nanggung
Kabupaten Bogor

Bab IV: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

4.1 Program Dan Kegiatan

Perumusan program dan kegiatan Kecamatan Nanggung untuk tahun 2023 dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mendukung tercapainya target Kabupaten Bogor menjadi kabupaten termaju di Indonesia yang terkait dengan 25 indikator penciri termaju.
2. Mendukung terwujudnya target kinerja pemerintah daerah, baik ditinjau dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum urusan wajib dan pilihan, serta aspek daya saing yang dituntut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan telah diakomodir dalam Perubahan RPJMD dan/atau Renstra Kecamatan Nanggung dalam bentuk indikator kinerja kunci.
3. Mendukung tercapainya perwujudan Kabupaten Bogor yang memiliki keunggulan lokal.
4. Mendukung tercapainya standar pelayanan minimal/standar nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Keseluruhan program dan kegiatan tersebut disesuaikan dengan prioritas dan fokus pembangunan tahun 2021 yang telah ditetapkan, serta tercantum dalam sistem RKKecamatan Nanggung Kabupaten Bogor *Online*. Perumusan rancangan program/kegiatan tahun 2021 disajikan dalam Tabel 3.2.

Bab IV :Penutup

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan penetapan dokumen Renja oleh Kepala Kecamatan Nanggung /Camat setelah mendapat pengesahan dari Bupati Bogor, meliputi : (1) tempat dan tanggal dokumen, (2) nama Kecamatan Nanggung, nama dan tanda tangan kepala Kecamatan Nanggung, serta cap Kecamatan Nanggung yang bersangkutan.

BAB II

Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Nanggung Tahun 2021

1. CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN

Pada Tahun Anggaran 2021 Bagian Umum melaksanakan 6 (enam) Program dan 14 (Empat Belas) kegiatan 49 (Empat Puluh Sembilan) Sub Kegiatan.

Kecamatan Nanggung Melaksanakan 6 program, yang terdiri dari:

- (1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri dari 3 kegiatan 6 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 61,46 dan tingkat capaian anggaran sebesar 89,94;
- (2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri dari 2 kegiatan 3 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 100% dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,69%;
- (3) Program Koordinasi Ketntraman dan Ketertiban Umum terdiri dari 1 kegiatan 1 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 100 dan tingkat capaian anggaran sebesar 99,31%;
- (4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum terdiri dari 1 kegiatan 5 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 100 dan tingkat capaian anggaran sebesar 93,63%;
- (5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri dari 1 kegiatan 12 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 93,37% dan tingkat capaian anggaran sebesar 95,83%;
- (6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 6 kegiatan 22 Sub kegiatan. Tingkat capaian kinerja program (*outcome/indicator program*) sebesar 97,22% dan tingkat capaian anggaran sebesar 90,36%.

Realisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Nanggung Tahun Anggaran 2021 menghasilkan rata-rata capaian indikator kinerja *output* sebesar 90,25% termasuk dalam katagori predikat Tinggi, Adapun realisasi Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 4.825.918.228 atau sebesar 90,76% Predikat Tinggi dari total Rencana Anggaran sebesar Rp 5.317.161.507, dan keberhasilan pelaksanaan program tersebut ditandai oleh rata-rata tingkat capaian program (*outcome*) sebesar 92,42% predikat Sangat Tinggi.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN KECAMATAN NANGGUNG

Dalam rangka implementasi pelimpahan wewenang berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati Bogor telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada Camat, yang terdiri dari 27 bidang yang meliputi :

1. Bidang Pertanian dan ketahanan pangan meliputi :
 - a. Sub bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
 - b. Sub Bidang Perkebunan
 - c. Sub bidang peternakan
2. Bidang Perikanan
3. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral meliputi :
 - a. Sub bidang pertambangan umum
 - b. Sub bidang ketenagalistrikan
4. Bidang Kehutanan
5. Bidang Perindustrian
6. Bidang Perdagangan

7. Bidang Koperasi dan UKM
8. Bidang Kebudayaan dan Kepariwisataaana. Sub Bidang Kepariwisataaana
b. Sub Bidang Kebudayaan
9. Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian meliputi :
a. Sub bidang Ketenagakerjaan
b. Sub bidang ketransmigrasian
10. Bidang Kesehatan
11. Bidang Pendidikan
12. Bidang Sosial
13. Bidang Penataan Ruang
14. Bidang Pertanahan
15. Bidang Pekerjaan Umum
a. Sub bidang bangunan gedung dan lingkungan
b. Sub bidang Drainase
c. Sub bidang Bina Marga
d. Sub bidang Pemukiman
e. Sub bidang Persampahan
16. Bidang Perumahan
17. Bidang Perhubungan⁴⁴
a. Sub bidang Perhubungan Darat
18. Bidang Lingkungan Hidup
19. Bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
20. Bidang Pemerintahan umum dan administrasi keuangan daerah

- a. Sub bidang Trantibum dan Linmas
- b. Sub bidang Administrasi keuangan daerah

21. Bidang Kependudukan

22. Bidang pemuda dan olah raga

23. Bidang komunikasi dan informasi

24. Bidang kearsipan dan perpustakaan

25. Bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera

26. Bidang perencanaan pembangunan

27. Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

- a) Sub bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
- b) Sub bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
- c) Sub bidang Pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat.

Sedangkan dalam kerangka efektifitas pelayanan kepada masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Kepada Camat yang meliputi :

a. Perijinan

- 1. Dihapus,
- 2. Dihapus,
- 3. Izin spanduk dan umbul-umbul di luar ruangan;
- 4. Dihapus,
- 5. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;

6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Mikro;
7. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK);
8. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
9. Izin Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat;
10. Izin pengangkutan jenazah/kerangka keluar daerah/negeri;
11. Izin Pembangunan atau Penembokan Makam di Tempat Pemakaman Umum;
12. Izin penguburan di lahan pemerintah daerah; dan
13. Izin *huller*/penggilingan padi.⁴⁵

- b. Non perizinan terdiri atas surat keterangan dan rekomendasi izin

izin tertentu serta tanda daftar yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat diterbitkan oleh camat.

Selain melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati dalam kerangka menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati berdasarkan pelimpahan wewenang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a) Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
- b) Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c) Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d) Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah;
- e) Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f) Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- g) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
- h) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unsur Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
- i) Pelaksanaan administrasi Kecamatan; dan
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas serta mengacu pada Renstra Kecamatan Nanggung, maka analisis pencapaian kinerja Kecamatan Nanggung dapat dilihat pada tabel 2.1 pencapaian Kinerja Pelayanan dibawah ini;

TABEL 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021

URUSAN : **KEWILAYAHAN**
BIDANG URUSAN : **KEWILAYAHAN**
PERANGKAT DAERAH : **KECAMATAN NANGGUNG**

KODE				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) /KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN	20	20	20	2021		
							18	19	20	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1				2	3	4	5	6	7	9	10	$\frac{11}{(10/9)} \times 100\%$
2019												
60	01	11		Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum	Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	keg	4	4	4			
			0006	Pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan	jumlah dokumen pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan	dok	1	1	1			
			0008	Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an	Terselenggaranya MTQ	Kali	2	2	2			

			00 09	Penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan	jumlah penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar keagamaan	Kali	2	2	1			
			00 10	Peringatan hari besar nasional/ daerah tingkat kecamatan	jumlah penyelenggaraan kegiatan hari-hari besar nasional/daerah	Kali	2	2	2			
60	0 1	12		Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	keg	12	15	15			
			00 01	Penyusunan monografi kecamatan	Jumlah Laporan Monografi Kecamatan yang Tersusun	dok	1	1	1			
			00 02	penataan administrasi pertanahan	jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	2	2	2			
			00 04	Pembinaan Masalah Sosial	jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	12	12	12			
			00 06	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan registrasi kependudukan	dok	12	12	12			

		00 07	Pembinaan dan pengawasan wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah	Jumlah desa yang dibina	Desa	16	16	16			
		00 08	Penyelenggaraan Lomba - Lomba Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional	Jumlah Fasilitas Lomba- lomba yang dilaksanakan	keg	2	2	2			
		00 09	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pembinaan	kali	12	12	12			
		00 11	Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian perekonomian dan pembangunan	Jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	-	2	2			
		00 12	Pembinaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian	Jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	-	2	2			
		00 13	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya alam	Jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	-	2	2			

			00 15	Pembinaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan pembangunan	Jumlah dokumen hasil pembinaan	kali	12	12	12			
			00 16	Pembinaan pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat	Jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	1	1	1			
			00 17	Pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan konsumsi pangan	Jumlah bibit tanaman pangan yang dikembangkan di pekarangan	dok	1	1	1			
			00 18	Penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan	Terlaksananya Administrasi Terpadu kecamatan	kali	12	12	12			
			00 19	Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	-	1	1			
60	0 1	13		Program Pembinaan Desa/Kelurahan	Pembinaan oleh kecamatan	keg	2	2	2			
			00 05	Pembinaan administrasi pemerintahan desa/kelurahan	Jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	12	12	12			

			00 07	Pembinaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan	dok	2	2	2			
60	0 1	14		Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat	Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat	keg	3	3	3			
			00 01	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen pelaksanaan Musrenbang	dok	5	5	5			
			00 03	Penyelenggaraan Rapat Mingguan Kecamatan	Jumlah Kegiatan Rapat Minggu keliling tingkat Kecamatan yang terselenggara	kali	16	24	16			
			00 05	Penyelenggaraan Saba Desa/Kelurahan	Jumlah kegiatan saba desa/kelurahan yang terselenggara	kali	4	4	4			
60	0 1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	keg	11	11	11			
			00 01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jenis rekening yang dibayarkan	Jenis	3	3	3			

					Bulan	12	12	12			
			00 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayar pajaknya	Unit	9	9	9		
			00 03	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	4	4	4		
						Bulan	12	12	12		
			00 21	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	8	8	7		
			00 23	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Gedung	2	2	2		
			00 25	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	Jenis	2	2	2		
			00 27	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah	Kali	12	12	9		
			00 41	Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah dokumen dan Arsip yang ditata	dok	2	2	2		

			00 42	Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dikelola	Kali	12	12	12			
			00 43	Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah dokumen administrasi barang	dok	2	2	2			
			00 44	Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah petugas keamanan kantor	Orang	5	5	5			
						Bulan	12	12	12			
60	0	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur	keg	2	3	3			
			01 01	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang terpelihara	Gedung	1	1	1			
			01 10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	9	9	9			
						roda dua	5	5	5			
						roda empat	4	4	4			
				Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Serbaguna	Jumlah Gedung Kantor yang terpelihara	-	-	1	1			

60	01	03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Terwujudnya Disiplin Aparatur	keg	-	1	1			
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang terlengkapi	Stel	-	38	38			
60	01	05		Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD	keg	7	8	8			
			0001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan kantor	dok	6	6	6			
						Bulan	12	12	12			
			0002	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran SKPD	dok	2	2	2			
						Kali	2	2	2			
			0003	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD	dok	2	2	2			
			0004	Penyusunan perencanaan anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran	dok	2	2	2			

			00 05	Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	dok	12	12	12			
						Bulan	12	12	12			
			00 07	Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi media yang terselenggara	dok	5	5	5			
			00 08	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah dokumen renja SKPD	dok	2	2	2			
			00 09	Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah dokumen Rencana Strategis SKPD	dok	-	2	2			
2020												
#### #	0 1	21		Program Fasilitasi Urusan Tugas Umum Pemerintahan	Fersentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%			0			
			00 01	Penyelenggaraan Koordinasi Pimpinan Daerah di Tingkat Kecamatan	Jumlah rapat forkopimda tingkat kecamatan	%			0			
6E+ 05	0 1	22		Program Peningkatan Kinerja Kecamatan	Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan	%			80			
	0 1	22	01	Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	keg			8			

					Jumlah Dokumen Kegiatan	dok			7			
	01	22	02	Penyelenggaraan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	keg			10			
					Jumlah Dokumen Kegiatan	dok			6			
	01	22	03	Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	Desa			11			
					Jumlah Dokumen Kegiatan	dok			4			
	01	22	04	Koordinasi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	Desa			11			
					Jumlah Dokumen Kegiatan	dok			3			
	01	22	05	Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diselenggarakan	keg			16			
					Jumlah Dokumen Kegiatan	dok			2			
6E+05	01	23		Program Fasilitasi Kegiatan Perangkat Daerah	Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD	%			100			

0	23	01	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	keg			2			
				Jumlah Dokumen Kegiatan	dok			2			
0	23	02	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	keg			11			
				Jumlah Dokumen Kegiatan	dok			1			
0	23	03	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	keg			9			
				Jumlah Dokumen Kegiatan	dok			9			
0	23	04	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	Kali			2			
				Jumlah Dokumen Kegiatan	Doku men			2			
0	23	05	Fasilitasi Perangkat Daerah Bidang Pelayanan	Jumlah Kegiatan yang difasilitasi	Desa			11			

					Jumlah Dokumen Kegiatan	Doku men			3		
#### #	0 1	01		Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan layanan kesekretariatan	%			80. 1		
					Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai						
					Persentase perencanaan sesuai target				88		
					Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target				99		
					Persentase Pelayanan Kepegawaian				100		
	0 1	01	01	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	jenis rekening yang dibayarkan	Jenis			3		
	0 1	01	03	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik kantor	Jenis			2		

					yang tersedia							
01	01	04	Penyediaan Makanan dan Minuman	jumlah makanan dan minuman yang tersedia	Bulan			10				
01	01	51	Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	dok			1				
01	01	52	Pengelolaan Keamanan Kantor	jumlah petugas keamanan kantor	Orang			3				
01	01	53	Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan	Orang			4				
					Bulan			12				
01	01	54	Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	jumlah kendaraan dinas/ operasional yang legal	Unit			8				
01	01	300	Revitalisasi Gedung Utama Kantor	Jumlah Gedung Yang terbangun	Unit							
01	01	354	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara	Unit			9				
01	01	356	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpelihara	Jenis			2				

01	01	357	Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Instalasi yang terpelihara	Gedung						
01	01	450	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat koordinasi yang terselenggara	Tahun			1			
01	01	1003	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen yang tersedia	Bulan			12			
01	01	2003	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang tersedia	dok			6			
					Bulan			12			
01	01	2001	Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen yang tersedia	Dok			3			
01	01	2002	Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	dok			12			
01	01	2004	Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen yang tersedia	dok			4			
01	01	2005	Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang tersedia	dok			2			

01	0 2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI TINGKAT KECAMATAN	%						
01	0 2	2.0 1		<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>	<i>Pelaksanaan koordinasi dan efektifitas kegiatan pemerintahan di kecamatan sesuai target</i>	%						
01	0 2	2.0 1	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi/Siner gi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang ditindaklanjuti	Kali				11	11	100.0

01	0 2	2.0 1	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Kali				11	11	100.0
01	0 2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	%						
01	0 2	2.0 2	01	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat Kecamatan yang	Kali				11	11	100.0

					dilaksanakan							
01	0 2	2.0 2	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	Kali				11	11	100.0
01	0 2	2.0 4		<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase pelayanan masyarakat pada bidang Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang</i>	%						

					<i>dolaksanakan</i>							
01	0 2	2.0 4	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Persentase pelayanan masyarakat pada bidang Urusan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Usaha	Kali				11	11	100.0
01	0 2	2.0 4	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan masyarakat pada bidang Urusan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non perizinan	Kali				11	11	100.0

01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan	%						
01	03	2.0 1		<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa sesuai target</i>	%						
01	03	2.0 1	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Presentase jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa				11	11	100.0
01	03	2.0 1	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	Kali				11	11	100.0

01	0 3	2.0 5		<i>Koodinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)</i>	<i>Persentase patroli penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan</i>	%						
01	0 3	2.0 5	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah patroli satgas penangan Covid 19 di tingkat desa	Desa				11	11	100.0
01	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum	%						
01	0 4	2.0 1		<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>	<i>Persentase patroli dan pembinaan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan</i>	%						

01	04	2.01	01	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase pembinaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan	Desa				11	11	100.0
01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%						
01	05	2.01		<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah telah tersusun laporannya</i>	%						

01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	Kali				2	2.0	100.0
01	05	2.01	02	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	Kali				2	0.0	0.0

01	05	2.01	03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	Kali				2	0.0	0.0
01	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	Kali				2	2.0	100.0
01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Presentase rapat dan pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	Kali				2	0.0	0.0

01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase jumlah desa tertib administrasi	%						
01	06	2.01		<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai target	%						
01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina	Desa				11	11	100.0
01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terbina	Desa				11	11	100.0
01	06	2.01	04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah desa yang terfasilitasi	Desa				11	11	100.0

01	0 6	2.0 1	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah kepala desa yang dibina	Desa				16	16.0	100.0
01	0 6	2.0 1	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina	Desa				11	11	100.0
01	0 6	2.0 1	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	Desa				11	11	100.0
01	0 6	2.0 1	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang terfasilitasi	Desa				11	11	100.0
01	0 6	2.0 1	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Presentase Lembaga kemasyarakatan yang difasilitasi	Desa				11	11	100.0
01	0 6	2.0 1	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Presentase hasil usulan Musrenbang yang menjadi prioritas	Desa				11	11	100.0

01	0 6	2.0 1	16	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	Desa				11	11	100.0
01	0 6	2.0 1	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Presentase jumlah kegiatan samisade yang terealisasi	Desa				11	11	100.0
01	0 6	2.0 1	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	Desa				11	11	100.0
01	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah tersusun	%						

01	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah tersusun	%						
01	0 1	2.0 1	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat (Renstra, Renja & Renja P)	Dok				4	3.0	75.0
01	0 1	2.0 1	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang dibuat	Dok				4	4.0	100.0
01	0 1	2.0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang dibuat	Dok				4	4.0	100.0
01	0 1	2.0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang dibuat	Dok				4	2.0	50.0

01	0 1	2.0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang dibuat	Dok				4	3.0	75.0
01	0 1	2.0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat (LAKIP, LKPJ, LPPD, dll)	Dok				4	4.0	100.0
01	0 1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	%						
01	0 1	2.0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibuat	Orang				14	14.0	100.0

01	0 1	2.0 2	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dibuat	Dok				4	4.0	100.0
01	0 1	2.0 2	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang ditindaklanjuti	Dok				4	4.0	100.0
01	0 1	2.0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dibuat	Dok				1	0.0	0.0
01	0 1	2.0 2	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Laporan keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	Dok				1	0.0	0.0

01	0 1	2.0 2	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	Dok				4	4.0	100.0
01	0 1	2.0 2	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang dibuat	Dok				4	0.0	0.0
01	0 1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan umum perangkat daerah yang sesuai target	%						
01	0 1	2.0 6	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis				4	4.0	100.0
01	0 1	2.0 6	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	Dok				4	0.0	0.0

01	0 1	2.0 6	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah yang terlaksana	Kali				24	18.0	75.0
01	0 1	2.0 6	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Arsip Dinamis pada SKPD yang tertata	Kali				12	12.0	100.0
01	0 1	2.0 7		<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai</i>	%						
01	0 1	2.0 7	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor yang tersedia	Unit				3	3.0	100.0
01	0 1	2.0 8		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah yang tersedia</i>	%						

01	0 1	2.0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terbayar tepat waktu	Bulan				12	12.0	100.0
01	0 1	2.0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Jenis				2	0.0	0.0
01	0 1	2.0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jasa Pelayanan Umum kantor yang tepat waktu	Kali				12	12.0	100.0
01	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang layak untuk seluruh pegawai	%						

01	0 1	2.0 9	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan,paj ak,dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang sesuai target	Unit				9	2.0	22.2

2.2.1 Pencapaian Pelayanan Kinerja Kecamatan Nanggung

Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Nanggung didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:

TABEL 2.3
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
HINGGA TAHUN 2021

URUSAN : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NANGGUNG

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	SATUAN	20	20	20	2021		
			18	19	20	TARGET	REALISASI	REALISASI (%)
1	2	3	4	5	6	8	9	$10 = \frac{9}{8} \times 100\%$
1	TUJUAN							
	Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)	Poin	n/a	n/a	n/a	69		
2	SASARAN							
	Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien	%	n/a	n/a	n/a	69	69.00	100.00
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan	%	n/a	n/a	n/a	100	93.44	93.44

	Meningkatnya Pembinaan Kecamatan	%	n/a	n/a	n/a	100	83.37	83.37

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Nanggung

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Kecamatan NANGGUNG Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang di prioritaskan selama lima tahun ke depan (2018-2023) untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Kekuatan (S) :

- 1) Peraturan Pemerintah No.17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 2) Adanya dukungan dan komitmen antara atasan dan bawahan;
- 3) Adanya dukungan dana operasional penunjang kegiatan;
- 4) Terlaksananya kegiatan Briefing staff, rapat koordinasi muspika, UPT/Instansi dan kepala Desa serta Minggon di Tingkat Kecamatan.

Kelemahan (W)

- a. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat
- b. Rendahnya tingkat kesehatan masyarakat
- c. Belum efektifnya sistem pengendalian dan evaluasi, pembinaan, pelayanan dan pelaksanaan lainnya
- d. Masih adanya penduduk miskin dan pengangguran

- e. Belum optimalnya kuantitas dan kualitas infrastruktur
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai di kecamatan
- g. Rentannya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi banjir dan longsor
- h. Belum optimalnya etos kerja pegawai, budaya kerja dan disiplin kerja pegawai
- i. Belum sinergisnya koordninası antara Pemerintahan Kecamatan dan Desa

1. Lingkungan Eksternal

Peluang (O)

- a. Citra dan nilai kecamatan sebagai daerah pertanian
- b. Budaya politik masyarakat yang bersifat partisipatif cukup berperan mempengaruhi semakin tingginya tuntutan masyarakat untuk mengembangkan wilayah
- c. Adanya hubungan kemasyarakatan yang terjalin cukup baik, mempengaruhi situasi yang kondusif

Ancaman (T)

- a. Ketidakstabilan situasi perekonomian di tingkat nasional dan regional
- b. Menurunnya daya beli masyarakat yang berakibat kepada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.
- c. Rentannya kerusakan lingkungan akibat alih fungsi longsor dan banjir
- d. Tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi

Oleh karena itu isu isu strategi dari permasalahan tersebut antara lain; peningkatan sumber daya manusia yang berdaya

saing; pengelolaan dan pelestarian budaya daerah; peningkatan pelayanan kesehatan; peningkatan pelayanan pendidikan pengelolaan kebencanaan; peningkatan ketentraman dan ketertiban umum; reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan public, berdasarkan kewenangan kecamatan dan hasil pembahasan pada forum perangkat daerah maka dapat dirumuskan 1 isu strategis daerah Kecamatan Nanggung, yaitu peningkatan pelayanan publik.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN NANGGUNG

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nanggung, dalam hal ini Kecamatan Nanggung dalam tugas pokok dan fungsi yang didanai oleh APBD adalah sebatas pada pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh SKKecamatan Nanggung, sehingga secara tidak langsung Kecamatan Nanggung mendukung seluruh arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 , adalah sebagai berikut :

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL :

Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial dengan arah pembangunan/memfokuskan pada :

1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi;
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial;
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana.

KABUPATEN BOGOR :

Membangun Masa Depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa Dalam Rangka Reformasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah dengan arah pembangunan/fokus kepada :

1. Penguatan ekonomi masyarakat berbasis UMKM, pariwisata, dan produksi pertanian;
2. Peningkatan sistem kesehatan daerah;
3. Penguatan pelayanan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat dan desa;
4. Peningkatan ketahanan bencana dan ketahanan pangan.

3.2 Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Sasaran-sasaran Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor adalah sesuatu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi akan sesuatu yang harus dicapai, dan untuk itulah Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor telah merumuskan Tujuan dan Sasarannya yang mengacu pada Visi Misi Kabupaten Bogor yaitu sebagai berikut:

VISI Kabupaten Bogor adalah **TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN.**

MISI Kabupaten Bogor adalah **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH YANG BAIK.**

TUJUAN Kabupaten Bogor adalah Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berkualitas.

SASARAN Kabupaten Bogor adalah **TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK, BERSIH, EFEKTIF, DAN TERERCAYA.**

Tujuan merupakan turunan dari sasaran RPJMD yang akan dicapai atau di hasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang menunjukkan arah serta memfokuskan program dan kegiatan berdasarkan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Kecamatan Nanggung yaitu :

Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan Efisien

Data dari kuesioner kepuasan masyarakat (*kuesioner dari bagian organisasi SETDA Kabupaten Bogor*) sebagai data sekunder perhitungan.

Indikator tujuan

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan**
- 2. Meningkatkan Pembinaan Kecamatan**

Data dari LKJ-IP *Penilaian dari inspektorat Kab Bogor* sebagai data sekunder perhitungan.

2. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari tujuan, adapun sasaran renstra perangkat daerah Kecamatan Nanggung dan indikator sasarannya adalah:

Sasaran

- 1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan;**

2. Meningkatnya Pembinaan Kecamatan.

Indikator Sasaran :

- 1. Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik;**
- 2. Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan.**

Hasil isian kuesioner dari bagian organisasi SETDA Kabupaten Bogor, Jumlah kepuasan masyarakat, jumlah masyarakat yang mendapat pelayanan, kegiatan yang dilaksanakan oleh desa, total kegiatan yang sesuai dengan APBDES, dan dokumen RK Kecamatan Nanggung, APBDES, LKPJ, serta LKJ-IP Kecamatan Nanggung sebagai data sekunder perhitungan.

URAIAN	TOLOK UKUR	INDIKATOR	RUMUS	TARGET	
				VOLUME	SATUAN
	1	2	3	4	
TUJUAN					
Meningkatnya Kinerja Kecamatan Yang Transparan, Akuntabel dan		Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP)	Penilaian dari inspektorat Kab Bogor	75	Poin
SASARAN					
Meningkatnya Kualitas Pelayanan administrasi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kecamatan		Persentase jenis pelayanan di kecamatan yang tertangani dengan baik	Jumlah jenis pelayanan yang tertangani dengan baik/ total pelayanan yang tersedia * 100 %	100	%
Meningkatnya Pembinaan Kecamatan		Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau kegiatan DPA Kelurahan	Jumlah Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes dan atau Kegiatan DPA Kelurahan / Jumlah Anggaran Kegiatan Dalam APBDes dan atau Kegiatan DPA Kelurahan x 100%	100	%

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program dan Kegiatan

Dalam Rencana Kerja 2023 sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan NANGGUNG akan melaksanakan program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
2. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program	Kegiatan	Anggaran	Pengampu
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3 Kegiatan 7 Sub Kegiatan	282,983,910	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	61,000,000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Kegiatan 2 Sub Kegiatan	26,250,000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	1 Kegiatan 5 Sub Kegiatan	194,976,000	Kecamatan Nanggung

UMUM			
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	1 Kegiatan 12 Sub Kegiatan	461,000,000	Kecamatan Nanggung
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8 Kegiatan 23 Sub Kegiatan	6,295,750,000	Kecamatan Nanggung

4.2 Rencana Program dan Kegiatan Sesuai Dengan Renstra

Kecamatan Nanggung Tahun 2018 – 2023

Rencana Kerja (Nanggung) merupakan acuan setiap perangkat daerah (Kecamatan Nanggung) dalam mengoperasikan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan, indikator kinerja program (outcomes)/Kegiatan (output) Kecamatan Nanggung Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum pada Tabel 4.1. berikut :

TABEL 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2023

URUSAN /UNSUR : KEWILAYAHAN
BIDANG URUSAN : KEWILAYAHAN
PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN NANGGUNG

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	TARGET TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024	
					VOLUME	ANGGARAN (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	VOLUME	ANGGARAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah tersusun	%	100	5,124,684,942	PD	APBD	100	6,790,344,341

1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah tersusun	Doku men	7	88,034,725	PD	APBD	7	87,895,308
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dibuat (Renstra, Renja & Renja P)	3	Doku men	22,131,000	PD	APBD	80	24,344,100
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang dibuat	2	Doku men	8,100,300	PD	APBD	80	8,910,330
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang dibuat	2	Doku men	8,129,900				
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD yang dibuat	2	Doku men	8,428,400	PD	APBD	80	9,271,240
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang dibuat	2	Doku men	7,349,000	PD	APBD	80	8,083,900

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dibuat (LAKIP, LKPJ, LPPD, dll)	9	Doku men	22,935,425	PD	APBD	80	25,228,968
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang akuntabilitas	16	Doku men	10,960,700	PD	APBD	80	12,056,770
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target	Doku men	7	3,643,537,887	PD	APBD	7	3,939,998,556
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang dibuat	1	Tahun	3,556,168,608	PD	APBD	80	3,911,785,469
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang dibuat	12	Doku men	61,721,018				
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang dibuat	1	Doku men	9,279,861	PD	APBD	80	10,207,847

		Tahun SKPD								
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik	18	Dokumen	8,047,150	PD	APBD	80	8,851,865
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang dibuat	1	Dokumen	8,321,250	PD	APBD	80	9,153,375
1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah telah tersusun	Dokumen	1	21,438,554	PD	APBD	1	7,756,682
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang dibuat	2	Dokumen	7,713,700	PD	APBD	80	8,485,070
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Dokumen	6,673,325	PD	APBD	80	7,340,658

		Milik Daerah pada SKPD	yang dibuat							
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dibuat	2	Dokumen	7,051,529	PD	APBD	80	7,756,682
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan umum perangkat daerah yang sesuai target	Layanan	3	101,921,090	PD	APBD	2	98,088,199
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang dibuat	4	Dokumen	89,171,090	PD	APBD	80	98,088,199
		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaiyang ditindaklanjuti	24	Kali	8,500,000	PD	APBD	80	9,350,000
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja	24	Dokumen	4,250,000	PD	APBD	80	4,675,000

			Pegawai yang dibuat							
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Pelayanan umum perangkat daerah yang sesuai target	Layanan	10	44,678,400	PD	APBD	10	28,411,240
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	2	Bulan	18,378,100	PD	APBD	80	20,215,910
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diikuti/ dihadiri	24	Kali	18,850,000				
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip Dinamis pada SKPD yang ditata	12	Ruang	7,450,300	PD	APBD	80	8,195,330
1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	Dokumen	100	734,671,857	PD	APBD	100	2,303,059,628
		Pengadaan Mebel	Jumlah Meja, Kursi, Sofa yang tersedia	3	Jenis	97,833,400	PD	APBD	80	107,616,740

		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	4	Jenis	104,601,349	PD	APBD	80	1,609,982,069
		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	1	Jenis	532,237,108	PD	APBD	80	585,460,819
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia	Layanan	3	240,577,026	PD	APBD	3	264,634,729
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk/ keluar yang tercatat di buku register	12	Bulan	9,315,150	PD	APBD	80	10,246,665
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dibayarkan	12	Bulan	63,492,000	PD	APBD	80	69,841,200
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pelayanan umum kantor yang tersedia	12	Bulan	167,769,876	PD	APBD	80	184,546,864
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Layanan	4	55,000,000	PD	APBD	4	60,500,000

	Urusan Pemerintahan Daerah		Pemerintahan Daerah yang terpelihara							
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya dan terpeliharanya	9	Unit	55,000,000	PD	APBD	80	60,500,000
	PROGRAM UTAMA									
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI TINGKAT KECAMATAN	8	80	279,513,497	PD	APBD	80	73,120,491
2.1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Persentase Koordinasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan	Dokumen	4	197,311,386	PD	APBD	4	24,373,495

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Persentase rekomendasi hasil Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang ditindaklanjuti	2	Kegiatan	177,140,000	PD	APBD	100	12,186,746
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Perseentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	2	Kegiatan	20,171,386	PD	APBD	100	12,186,749
2.2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan	Dokumen	2	82,867,254	PD	APBD	2	24,373,498

		Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	5	Data	56,469,554	PD	APBD	100	12,186,749
		Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	6	Kegiatan	26,397,700	PD	APBD	100	12,186,749
2.3	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>		<i>Persentase pelayanan masyarakat pada bidang Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang dilaksanakan</i>	Dokumen	2	32,883,700	PD	APBD	2	24,373,498
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait	Persentase pelayanan masyarakat pada bidang Urusan	11	Layanan	20,060,300	PD	APBD	100	12,186,749

		dengan Nonperizinan	Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non perizinan							
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Persentase pelayanan masyarakat pada bidang Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	14	Layanan	12,823,400	PD	APBD	100	12,186,749
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase Pencapaian program pembangunan di tingkat kecamatan	%	80	268,536,621	PD	APBD	80	36,181,316
3.1	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>		<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang diselenggarakan</i>	Dokumen	2	87,153,800	PD	APBD	2	24,120,877
		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Presentase jumlah peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11	Kali	21,585,450	PD	APBD	100	12,060,438

		Desa								
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Perseentase kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	7	Kegiat an	65,568,350	PD	APBD	100	12,060,439
	Koodinasi dan Sinkronisasi Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)		Persentase patroli penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dilaksanakan	%	80	10,200,000	PD	APBD	80	12,060,439
		Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah patroli satgas penanganan Covid 19 di tingkat desa	%	80	10,200,000	PD	APBD	100	12,060,439
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga,			23,775,500	PD	APBD	100	12,060,439

			dan Kelompok Masyarakat							
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	16	Desa	23,775,500	PD	APBD	100	12,060,439
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penanganan gangguan trantibum	%	100	61,736,182	PD	APBD	100	8,644,787
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase patroli dan pembinaan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	Dokumen	2	50,000,000	PD	APBD	2	8,644,787

		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Baik	3	Kegiatan	25,000,000	PD	APBD	100	4,322,393
		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan Baik	3	Kegiatan	25,000,000	PD	APBD	100	4,322,394
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase patroli Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada yang dilaksanakan			37,500,000				
		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	1	Kegiatan	37,500,000	PD	APBD	100	4,322,394

		Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							
5	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan	%	100	319,251,870	PD	APBD	100	33,378,484
5.1	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>		<i>Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah telah tersusun laporannya</i>	Dokumen	7	220,120,000	PD	APBD	7	33,378,484

	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	4	Kegiatan	16,620,000	PD	APBD	100	6,675,697
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	4	Kegiatan	8,500,000	PD	APBD	100	6,675,697

		Ketahanan Nasional								
		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	1	Kegiatan	8,500,000	PD	APBD	100	6,675,697
		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	1	Kegiatan	153,000,000	PD	APBD	100	6,675,697
		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan	1	Kegiatan	8,500,000	PD	APBD	100	6,675,696
		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi	Persentase peserta (masyarakat/ kelompok)	1	Kegiatan	25,000,000	PD	APBD	100	6,675,696

		Pimpinan di Kecamatan	masyarakat/ desa/ dll) yang mengikuti pembinaan							
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase jumlah desa tertib administrasi	%	100	354,237,520	PD	APBD	100	211,454,375
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Pelaksanaan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa sesuai target	Dokumen	2	332,334,561	PD	APBD	2	211,454,375
		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina	11	Desa	67,053,536	PD	APBD	100	19,223,125
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	11	Desa	23,456,400	PD	APBD	100	19,223,125
		Fasilitasi penerapan dan Penegakan	Jumlah desa yang terfasilitasi	11	Desa	9,650,000	PD	APBD	100	19,223,125

		Peraturan Perundang-Undangan								
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah desa yang terfasilitasi	11	Desa	15,771,000	PD	APBD	100	19,223,125
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah BPD yang dibina	11	Desa	9,438,000	PD	APBD	100	19,223,125
		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang terfasilitasi	11	Desa	42,500,000	PD	APBD	100	19,223,125
		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Presentase rekomendasi yang ditindaklanjuti	11	Desa	69,442,000	PD	APBD	100	19,223,125
		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan	Jumlah desa yang terfasilitasi	11	Desa	26,400,000	PD	APBD	100	19,223,125

		Masyarakat Desa								
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Prosentase hasil usulan MUSRENBANG yang menjadi prioritas	11	Desa	25,788,625	PD	APBD	100	19,223,125
		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Presentase jumlah kegiatan samisade yang terealisasi	11	Desa	26,435,000	PD	APBD	100	19,223,125
		Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan yang dilaksanakan	11	Desa	16,400,000	PD	APBD	100	19,223,125
						6,407,960,632				7,153,123,794

BAB IV

PENUTUP

Dalam rangka mencapai target Visi Kabupaten Bogor, isi dokumen Renja Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tahun 2023 diharapkan mampu diaplikasikan oleh seluruh unsur internal Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Rencana Kerja Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tahun 2023 ini disusun untuk dipedomani oleh seluruh pemangku kepentingan, baik yang terkait dalam proses penyusunan maupun pemanfaatannya.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yangtelah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan isi Renja Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Demikian Renja Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor tahun 2023 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2023.

Di tetapkan di : Nanggung
Tanggal : 2023

CAMAT

AE SAEPULOH SE,MA
Pembina
NIP. 197011221994031004

